BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Grasi merupakan instrumen hukum yang memungkinkan kepala negara memberikan pengampunan kepada seorang terpidana. Ini bukan hanya sebuah tindakan kemanusiaan, tetapi juga bagian dari sistem hukum yang berperan dalam menyempurnakan rasa keadilan. Pengaturan mengenai grasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Dalam undang-undang tersebut mengatur mengenai pemberian grasi secara luas yang dapat diberikan kepada seluruh terpidana yang telah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan grasi. Meskipun mengatur pemberian grasi terhadap seluruh terpidana, namun pada Undang-Undang ini tidak mengatur secara khusus mengenai pemberian grasi terhadap tindak pidana narkoba yang mana tindak pidana narkoba termasuk ke dalam kejahatan luar biasa.
2. Pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana melalui proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Proses ini mencakup syarat-syarat tertentu. Namun jika dilihat dalam kasus yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, apabila presiden memberikan grasi, presiden mengabdikan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Ini mencakup faktor-faktor seperti kondisi kesehatan terpidana dan

keadilan dalam penerapan hukuman. Meskipun dalam pemberian grasi dapat didasarkan pada pertimbangan yang beralasan, keputusan presiden memberikan grasi dalam kasus terpidana narkoba sering kali menuai kontroversi dan kritik. Ada kekhawatiran bahwa pemberian grasi kepada terpidana narkoba bisa memberikan sinyal yang salah atau mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Maka diperlukan kriteria atau indikator yang jelas bagi presiden dalam memutuskan pemberian grasi.

B. Saran

Terhadap perumusan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pemberian grasi terhadap pelaku tindak pidana narkoba, maka penulis menyarankan:

1. Untuk meningkatkan ketegasan dan kejelasan dalam proses pemberian grasi, khususnya terkait dengan tindak pidana narkoba, yaitu dengan menyertakan ketentuan yang spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Usulan yang dapat dipertimbangkan dalam penyempurnaan Undang-Undang tersebut adalah dalam Undang-Undang tersebut harus secara jelas mengatur mengenai pemberian grasi kepada terpidana tindak pidana narkoba.
2. Dalam pemberian grasi oleh presiden kepada terpidana khususnya bagi terpidana tindak pidana narkoba perlu adanya kriteria atau indikator secara jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002

jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi untuk dijadikan dasar penilaian untuk presiden dalam mengeluarkan keputusan grasi sehingga Keputusan tersebut didasarkan pada penilaian yang objektif dan adil.